



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA



# **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024**

**BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esayang telah melimpahkan rahmat, anugerah dan inayahNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Balai Diklat Industri Makassar tahun 2020- 2024 dapat diselesaikan.

Renstra Balai Diklat Industri Makassar yang telah dilakukan revisi ini menjadi pedoman kerja bagi aparat dilingkungan BDI Makassar selama kurun waktu 2020-2024 Sedangkan tujuan dari Renstra ini adalah untuk melakukan perencanaan terpadu dan mensinergikan serta mengharmonisasikan program secara komprehensif serta pengendaliannya, dan mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Kementerian Perindustrian yang tertuang dalam Kebijakan Industri Nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor: 40/M- IND/PER/5/2014 yang dituangkan ke dalam bentuk kegiatan baik bidang operasional maupun bidang pembinaan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BDI Makassar selama 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Nasional disusun dalam kerangka pembangunan SDM jangka menengah. Oleh karena itu disadari sepenuhnya bahwa Rencana Strategis BDI Makassar 2020-2024 secara berkala akan dilakukan evaluasi dan penyempurnaan.

Renstra yang dibuat ini tentunya tidak luput dari kekurangan sehingga secara berkala akan dilakukan evaluasi dan penyempurnaan oleh karena itu sangat diharapkan adanya masukan-masukan dalam perbaikan renstra ini. Akhir kata terimakasih kepada pihak-pihak yang telah ikut membantu penyusunan Renstra ini dan semoga dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan tugas dilingkungan BDI Makassar.

Makassar, Januari 2022

**Kepala  
Balai Diklat Industri Makassar**



**C. Elisa M. Katili, SH.,MH.**

NIP. 195803291979031001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>3</b>
<b>P E N D A H U L U A N.....</b>	<b>3</b>
1.1. KONDISI UMUM.....	3
<b>1.1.1. Pembangunan Industri Nasional .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1.2. Pembangunan SDM Industri .....</b>	<b>6</b>
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN .....	8
<b>BAB II.....</b>	<b>12</b>
2.1. Visi BDI Makassar 2020-2024 .....	12
2.2. Misi BDI Makassar 2020-2024 .....	12
2.3. Tujuan BDI Makassar 2020-2024.....	14
2.4. Sasaran Strategis Unit Kerja .....	14
<b>A. Sasaran Strategis Perspektif Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders Perspective</i>) .....</b>	<b>16</b>
<b>B. Sasaran Strategis Perspektif Proses Internal (<i>Internal Process Perspective</i>) .....</b>	<b>16</b>
<b>C. Sasaran Strategis Perspektif Pembelajaran Organisasi (<i>Learning and Growth Perspective</i>) .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>18</b>
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BDI Makassar 2020-2024 .....	18
<b>3.1.1. Penguatan Kelembagaan Balai Diklat Industri.....</b>	<b>25</b>
3.2. Kerangka Regulasi .....	29
3.3. Kerangka Kelembagaan.....	29
<b>BAB IV.....</b>	<b>33</b>
4.1 Target Kinerja .....	33
<b>BAB V .....</b>	<b>35</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>36</b>
Lampiran 1 Pohon Kinerja.....	36
Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Unit Kerja .....	37
Lampiran 3 Matriks Keterkaitan antara Aktivitas/Kegiatan, KRO, RO, Indikator Kinerja, dan Sasaran Strategis.....	39
Lampiran 4 Pedoman Kinerja .....	43
Lampiran 5 Matriks Kerangka Regulasi.....	48

## BAB I

# P E N D A H U L U A N

### 1.1. KONDISI UMUM

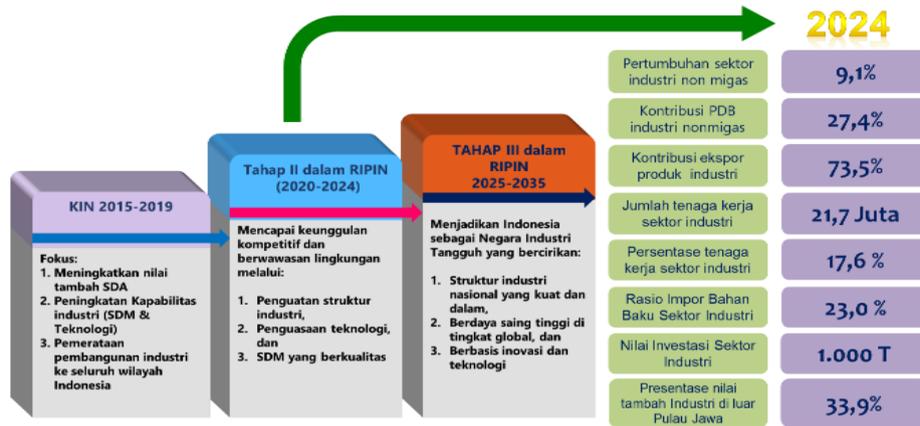
#### 1.1.1. Pembangunan Industri Nasional

Sektor industri merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. Sektor industri tidak saja memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan devisa, tetapi juga pada pembentukan daya saing nasional. Peran penting sektor industri tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (selanjutnya disebut UU No. 3/2014 Perindustrian) di mana industri diletakkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong kemajuan industri nasional secara sistematis dan terencana agar mampu tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain untuk mencapai visi Indonesia Maju 2030.



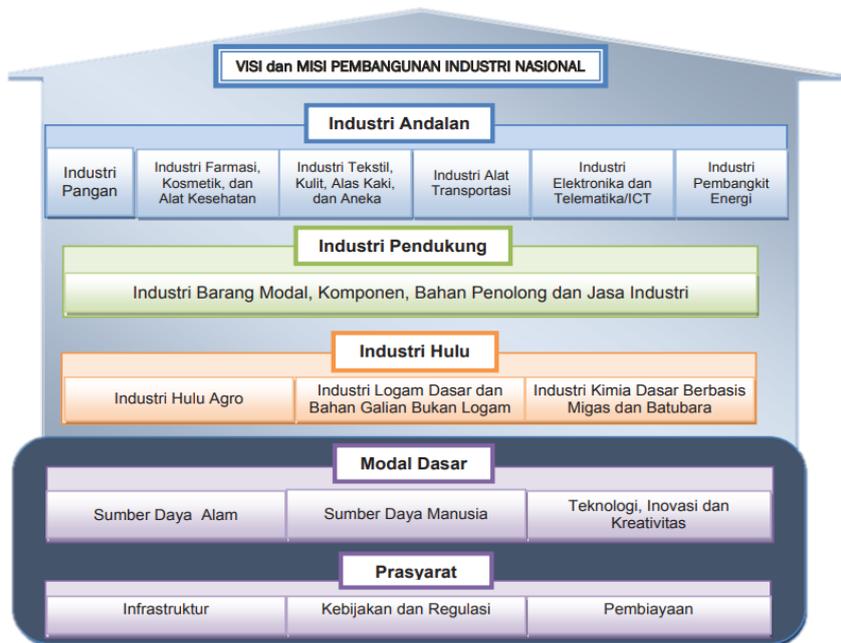
Gambar 1. Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam UU No. 3/2014 Perindustrian  
Sumber: UU No. 3/2014 Perindustrian

Arah dan kebijakan pembangunan industri nasional dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 14/2015. Sebagai peta jalan pembangunan industri jangka panjang, RIPIN 2015-2035 merupakan pedoman bersama bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri di Indonesia.



Gambar 2. Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam RIPIN  
Sumber: PP No. 14/2015 RIPIN 2015-2035

RIPIN Tahun 2015-2035 membagi capaian pembangunan industri ke dalam tiga tahap (lihat Gambar 2), yaitu Tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral, dan migas; diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan melalui penyiapan SDM (wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri) yang ahli dan kompeten, serta peningkatan penguasaan teknologi. Tahap II (2020-2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas. Sedangkan Tahap III (2025-2035) adalah Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi (lihat Gambar 3). Saat ini, implementasi RIPIN telah memasuki Tahap II, yang dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Nasional (KIN) periode 2020-2024.



Gambar 3. Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional  
Sumber: PP No. 14/2015

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan sektor industri nonmigas (2019), setidaknya dibutuhkan pertumbuhan sektor industri sebesar 6,2% setiap tahunnya agar dapat memberikan kontribusi sebesar 19,4% terhadap PDB dengan jumlah ekspor produk industri diharapkan mencapai 77,6% dari total ekspor Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan sekitar 17,1 juta tenaga kerja sektor industri dengan proyeksi kebutuhan tenaga kerja industri sebesar 600 ribu pekerja setiap tahunnya.

Di sisi yang lain, seiring dengan perkembangan perindustrian global, pengembangan dan adopsi teknologi industri 4.0 muncul sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan industri nasional. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 di mana penerapan Industri 4.0 merupakan salah satu *major project* Pemerintah. Penerapan Industri 4.0 dinilai dapat memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur agar lebih efisien dan menghasilkan produk berkualitas, yang diharapkan akan menarik investasi di bidang industri, karena industri di Indonesia akan lebih produktif dan berdaya saing tinggi dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja Indonesia dalam mengadopsi teknologi. Untuk mewujudkan pembentukan SDM yang berkualitas dan berdaya saing maka diperlukan lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki daya saing, dan dapat diakses dengan mudah oleh kalangan SDM industri. Balai Diklat

Industri sebagai lembaga diklat yang mempunyai tugas untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, perlu menyusun rencana strategis agar tugas yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka melaksanakan program pendidikan dan pelatihan yang tepat sasaran, sistematis dan berkesinambungan maka Balai Diklat Industri Makassar merasa perlu menyusun **Rencana Strategis** pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dan dunia usaha di sektor industri.

### 1.1.2. Pembangunan SDM Industri

Menurut survei angkatan kerja nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, hingga tahun 2017, terdapat 128 juta angkatan kerja dari 192 juta penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sebanyak 121 juta bekerja, tetapi lebih dari 60% tenaga kerja berpendidikan maksimum SMP dan 87,9% berpendidikan SMA/SMK atau lebih rendah. Jumlah pengangguran terbuka mencapai 7 juta jiwa dengan 37,6% berpendidikan maksimum SMP dan 87,8% berpendidikan SMA/SMK atau lebih rendah.

Melihat realitas yang terjadi dalam upaya pembangunan SDM sampai hari ini, Indonesia belum siap untuk menyongsong Visi Indonesia 2030, terutama untuk menghadapi Pasar Bebas ASEAN dan bonus demografi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu menyerap dan menciptakan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan penurunan elastisitas pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja. Asumsi 1% pertumbuhan ekonomi mampu menyerap 350 ribu sampai 400 ribu tenaga kerja tidak dapat tercapai. Asumsi tersebut hanya mampu menyerap 200 ribu tenaga kerja tiap tahunnya. HDI (*Human Development Index*) atau Indeks Pembangunan Manusia Indonesia saat ini hanya 0,629 atau peringkat 121 dari 186 negara di dunia.

Tabel 1. Struktur Demografi Penduduk Indonesia

Usia*	Jumlah (%)	Pria (orang)	Wanita (orang)
<b>0 - 14 tahun</b>	25,82	33.651.533	32.442.996
<b>15 - 24 tahun</b>	<b>17,07</b>	<b>22.3238.735</b>	<b>21.454.563</b>
<b>25 - 54 tahun</b>	<b>42,31</b>	<b>55.196.144</b>	<b>53.124.591</b>
<b>55 - 64 tahun</b>	<b>8,18</b>	<b>9.608.548</b>	<b>11.328.421</b>
≥ 65 tahun	6,62	7.368.764	9.579.379

\*usia produktif ditandai dengan huruf tebal dan warna latar berbeda

Sumber: BPS 2017, diolah oleh Kemenperin

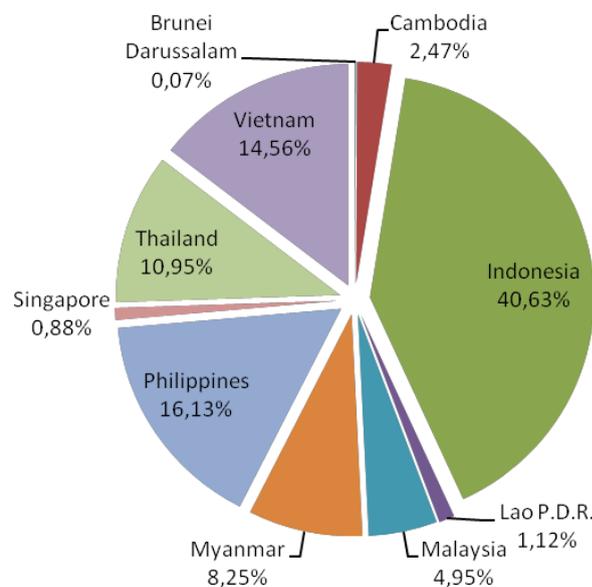
Hambatan pengembangan SDM di Indonesia dilandasi oleh tiga hal pokok yang tidak dapat dihindari, yaitu: *pertama*, liberalisasi dan eksklusivitas pendidikan yang menyebabkan sekolah mahal dan angka putus sekolah tinggi. *Kedua*, sistem pendidikan yang tidak *link and match*, artinya pendidikan hari ini lebih menitikberatkan pada kuantitas dan kualitas, bukan pada keterampilan. *Ketiga*, pembangunan SDM tidak menjadi prioritas pembangunan nasional, hal ini dapat dilihat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2004-2025 yang tidak menjadikan pembangunan SDM sebagai skala prioritas.

Kegagalan SDM hari ini merupakan bagian dari kegagalan perekonomian Indonesia yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Selain itu, belum adanya peta jalan pengembangan SDM dan visi misi yang jelas dalam RPJPN 2004-2025, serta pemerintah belum mampu meningkatkan masyarakat kelas bawah menuju kelas menengah secara signifikan. Kegagalan ini dapat dilihat dengan realitas dari 250 juta lebih penduduk Indonesia, sekitar 35 juta penduduk merupakan masyarakat miskin. Di sisi lain, hanya 3,78% penduduk yang berpendidikan S3, sementara penduduk yang berpendidikan SD mencapai 33% penduduk.

Oleh karena itu, untuk mengawali pembangunan SDM Indonesia diperlukan suatu solusi yang baru. Reformasi di bidang pendidikan semakin penting, terutama dengan mendorong pendidikan murah, reformasi sistem pendidikan yang *link and match* dan job, serta pengajaran budi pekerti. Tidak hanya itu, dibutuhkan pula pengelolaan iklim tenaga kerja, revitalisasi pendidikan dan latihan SDM, pembangunan infrastruktur fisik dan nonfisik, pengembangan regulasi tenaga kerja, dan perbaikan hubungan industrial, serta menjadikan pembangunan SDM sebagai prioritas program pembangunan nasional. Solusi-solusi tersebut diharapkan mampu mengantar Indonesia menuju Visi Indonesia 2030 dengan SDM yang siap dan berdaya saing.

## 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Salah satu keunggulan Indonesia adalah bonus demografi yang besar. Berdasarkan proyeksi Kementerian PPN/Bappenas (2015), bonus demografi Indonesia akan mencapai puncak pada tahun 2025. Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar di ASEAN yang mencakup lebih dari 40% penduduk ASEAN. Selain itu Indonesia juga merupakan negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia atau sebesar 3,44% populasi dunia. Salah satu kekuatan penting dalam komposisi demografi Indonesia adalah jumlah usia muda yang besar sebagai angkatan kerja, yaitu sebanyak 172.951.002 jiwa atau sebesar 67.5% dari total penduduk Indonesia. Apabila dikelola dengan baik, penduduk usia produktif dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan pengembangan inovasi untuk mendorong peningkatan daya saing. Sebaliknya, bila tidak dikelola dengan baik, bonus demografi berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti pengangguran.



Gambar 4. Populasi Indonesia di ASEAN  
Sumber: Sumber: BPS 2017, diolah Kemenperin

Merujuk pada RIPIN 2015-2035, tenaga kerja industri akan bertambah rata-rata 600 ribu pekerja per tahun. Oleh karena itu, target pembangunan SDM industri untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri adalah rata-rata 3,2 persen per tahun dengan komposisi tenaga kerja manajerial sebesar 12% (dua belas persen) dan tenaga kerja teknis sebesar 88% (delapan puluh delapan persen). Demi tercapainya target tersebut, Balai

Diklat Industri Makassar dibawah BPSDMI bertugas untuk meningkatkan kualitas SDM industri. Namun demikian, keadaan di lapangan masih menunjukkan bahwa lembaga diklat dan lembaga sertifikasi yang ada saat ini belum mampu memenuhi kapasitas pelatihan dan sertifikasi sebanyak itu per tahunnya.

Di sisi yang lain, globalisasi menambah kompleksitas perkembangan pengembangan tenaga kerja industri. Menurut ASEAN *Framework on Service Agreement* (AFAS), perdagangan jasa di ASEAN dapat dilakukan dengan empat cara, atau dikenal dengan *four modes*. Cara ke-4 atau Mode 4 mengacu kepada "*movement of natural persons*", yaitu kehadiran tenaga kerja profesional asing di suatu negara untuk memberikan layanan jasanya. Dengan kata lain, Mode 4 merupakan suatu cara perdagangan jasa dengan cara menghadirkan tenaga kerja asing di Indonesia. Pemerintah sudah berupaya keras membatasi hal tersebut, namun globalisasi merupakan sebuah gelombang besar yang tidak dapat terbendung lagi.

Saat ini, dampak globalisasi Mode 4 yang paling relevan dengan Indonesia adalah pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam waktu dekat. Semangat yang dibawa oleh MEA adalah "*transform ASEAN into a region with free movement of goods, services, investment, skilled labour, and free flow of capital*". Dengan semangat tersebut, perpindahan tenaga kerja antarnegara anggota ASEAN akan menjadi semakin cepat. Hal ini akan mengakibatkan persaingan yang semakin ketat antar para pencari kerja. Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perindustrian, harus mempersiapkan suatu mekanisme peningkatan kompetensi SDM industri untuk menghadapi persaingan tersebut.

Permasalahan dalam pengembangan SDM industri tidak hanya soal jumlah dan kualitas, namun juga soal pengakuan kualifikasi. Salah satu isi kerja sama dalam MEA adalah mengenai "*recognition of professional qualification*" atau pengakuan kualifikasi dari tenaga kerja profesional. Pengakuan ini diakomodasi melalui *Mutual Recognition Agreement (MRA) for professional services*. MRA dari profesi tertentu mengatur bagaimana kualifikasi profesi tersebut diakui oleh ASEAN. MRA akan membuat satu lembaga yang mengakui kualifikasi profesional dari negara-negara ASEAN

berupa sertifikat kompetensi, dan sertifikat kompetensi inilah yang akan diakui oleh semua negara ASEAN. Artinya, perpindahan tenaga kerja lintas negara nanti tidak hanya menggunakan ijazah, tetapi juga sertifikat tersebut. Untuk mengakomodasi MRA tersebut, kita memerlukan suatu Standar Kompetensi Kerja yang dapat disandingkan dengan *National Qualification Framework* (NQF) milik negara lain, sehingga semua negara ASEAN memiliki pengertian yang sama mengenai kualifikasi profesional. Standar Kompetensi Kerja tersebut akan menjadi acuan bagi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan lembaga sertifikasi dalam membuat program pendidikan, program pelatihan, dan materi uji kompetensi.

Sejak masa awal pandemi hingga saat ini, upaya peningkatan produktivitas di sektor industri dalam telah dilakukan dengan pendekatan yang memprioritaskan penerapan protokol kesehatan. Hal tersebut diharapkan dapat memacu peningkatan utilitas dan memulihkan produktivitas, serta membuka kesempatan kerja dan mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang didukung dengan transformasi ekonomi dan perubahan sosial, salah satunya dengan dukungan teknologi digital yang meningkatkan efisiensi kerja. Ke depannya, prioritasasi pada upaya penanganan dampak COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan melanjutkan *trend* perkembangan yang positif ini.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah juga telah mengambil beberapa inisiasi kebijakan strategis untuk mendukung pembangunan bidang perindustrian di Indonesia. Inisiatif pertama adalah upaya implementasi peta jalan *Making Indonesia 4.0* pada tujuh sektor industri prioritas, yaitu industri makanan dan minuman, kimia, tekstil dan busana, otomotif, elektronika, farmasi serta alat kesehatan. Selain itu, pemerintah juga mencanangkan program substitusi impor hingga 35% pada 2022 melalui penurunan impor pada sektor-sektor dengan persentase impor terbesar, simultan dengan upaya peningkatan utilisasi produksi. Target substitusi impor dapat dicapai melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui pemberlakuan kewajiban bagi Kementerian, Lembaga, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri

dengan nilai TKDN dan BMP mencapai 40% seperti diatur dalam Pasal 61 PP No.29 tahun 2018. Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan TKDN yang sebelumnya cenderung bersifat *inward looking*, diarahkan agar berspektrum luas/*outward looking* dengan perspektif P3DN sebagai fasilitator.

Menghadapi potensi dan permasalahan seperti disebutkan di atas, Kementerian Perindustrian melalui satker BDI Makassar dibawah BPSDMI perlu secara strategis menajamkan perencanaan pembangunan SDM industri dalam Renstra BPSDMI Tahun 2020-2024 untuk memastikan bahwa agenda pembangunan SDM Industri di Indonesia dapat berjalan dengan efektif. Keberhasilan dalam implementasi kebijakan-kebijakan strategis di BDI Makassar akan berdampak pada tercapainya pemanfaatan potensi dan peluang yang ada sekaligus mengantisipasi setiap kendala dan hambatan yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bidang perindustrian di Indonesia. Di sisi yang lain, implementasi kebijakan strategis yang tidak berjalan secara efektif akan berdampak pada terjadinya stagnasi dan bahkan kemunduran performa bidang perindustrian di Indonesia.

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, BDI Makassar telah menyusun Rencana Strategis BDI Makassar Tahun 2020-2024 sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dan sesuai dengan Renstra BPSDMI Tahun 2020-2024 dan disusun dengan pedoman Peraturan Menteri (Permen) Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UNIT KERJA

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi BDI Makassar, maka telah ditetapkan **Visi , Misi dan Sasaran Unit Kerja** sebagai berikut:

#### 2.1. Visi BDI Makassar 2020-2024

Mengingat Balai Diklat Industri Makassar merupakan satuan kerja yang berada di bawah koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian, dan berdasarkan program Reposisi Balai Diklat Industri yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian dimana Balai Diklat Industri diarahkan untuk menjadi pusat pelatihan berbasis spesialisasi dan kompetensi serta dalam mewujudkan visi *Corporate University* BPSDMI Kementerian Perindustrian “**Menjadikan Vokasi Industri Bertaraf Global untuk mendukung pembangunan industri nasional yang berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara industri Tangguh**”, maka pengembangan kelembagaan Balai Diklat Industri (BDI) di lingkungan Kementerian Perindustrian ditetapkan visi dan misi yang diberlakukan sama di seluruh BDI di lingkungan Kementerian Perindustrian yaitu :“ **sebagai *Center of Excellences* penyiapan Sumber Daya Manusia Industri Kompeten**”.

#### 2.2. Misi BDI Makassar 2020-2024

Misi adalah merupakan gambaran yang membawa konsekuensi logis bahwa Balai Diklat Industri Makassar selaku unit pelaksana teknis bidang pendidikan dan pelatihan fungsional, teknis dan dunia usaha sektor industri senantiasa berupaya meningkatkan sumber daya yang ada sehingga diharapkan di masa depan akan mampu dan eksis dalam persaingan global.

Untuk dapat mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas maka Balai Diklat Industri Makassar menetapkan misi yaitu:

1. Mengembangkan ruang lingkup dan spesialisasi jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri (rumput laut, kakao, desain kemasan)
2. Mengembangkan program dan modul pelatihan berbasis kompetensi;
3. Menyelenggarakan Pelatihan berbasis kompetensi (*skilling, up-skilling, dan re-skilling*) tenaga kerja industri dengan sistem 3 in 1;
4. Mengembangkan skema dan uji kompetensi LSP;
5. Mengembangkan sertifikasi kompetensi internasional;
6. Membangun dan mengembangkan sinergi serta menumbuhkan wirausaha industri melalui penyelenggaraan inkubator bisnis;
7. Membangun dan mengembangkan *smart training facility*; dan
8. Menyelenggarakan pelatihan bagi ASN Pembina industri atas penugasan dari BPSDMI.

### 2.3 Tujuan BDI Makassar 2020-2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi seperti disebutkan di atas, Balai Diklat Industri Makassar menetapkan tujuan pembangunan SDM industri 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

**“Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tangguh.”**

Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui implementasi dan pengukuran indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi
- b. Jumlah inkubator bisnis industri yang tumbuh
- c. Persentasi nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BDI Makassar
- d. Nilai laporan keuangan BDI Makassar meningkat dari 70 pada 2020 menjadi 73 pada 2024.
- e. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) BDI Makassar meningkat dari 70 persen pada 2020 menjadi 73 persen pada 2024.
- f. Nilai kearsian BPSDMI meningkat dari 0 pada 2020 menjadi 80 pada 2024.
- g. Nilai rata-rata Indeks Kompetensi profesional ASN BDI Makassar meningkat dari 58 pada 2020 menjadi 73 pada 2024.

### 2.4 Sasaran Strategis Unit Kerja

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Balai Diklat Industri Makassar untuk periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

## PETA STRATEGIS BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR

Visi: *Center of Excellences* penyiapan Sumber Daya Manusia Industri Kompeten

- Misi: 1. Mengembangkan ruang lingkup dan spesialisasi jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri (Agro, Pangan, dan Fitopharmaca Desain Kemasan Industri )  
 2. Mengembangkan program dan modul pelatihan berbasis kompetensi;  
 3. Menyelenggarakan Pelatihan berbasis kompetensi (*skilling, up-skilling, dan re-skilling*) tenaga kerja industri dengan sistem 3 in 1;  
 4. Mengembangkan skema dan uji kompetensi LSP;  
 5. Mengembangkan sertifikasi kompetensi internasional;  
 6. Membangun dan mengembangkan sinergi serta menumbuhkan wirausaha industri melalui penyelenggaraan inkubator bisnis;  
 7. Membangun dan mengembangkan *smart training facility*; dan  
 8. Menyelenggarakan pelatihan bagi ASN Pembina industri atas penugasan dari BPSDMI.



**A. Sasaran Strategis Perspektif Pemangku  
Kepentingan (*Stakeholders Perspective*)**

- Sasaran Kegiatan Pertama (SKI) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja Industri”

Indikator Kinerja

- a. Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi

**B. Sasaran Strategis Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)**

- Sasaran Kegiatan Kedua (SK2) yang akan dicapai yaitu “Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan”

Indikator Kinerja

- a. Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Internasional dari 0 pada 2020 menjadi 2 sertifikasi pada 2024.
- b. Jumlah inkubator bisnis industri yang tumbuh dari 5 tenant menjadi 12 tenant pada 2024.

**C. Sasaran Strategis Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learning and Growth Perspective*)**

- Sasaran Kegiatan Ketiga (SK3), yaitu “Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri”,

Indikator Kinerja

- a. Persentasi nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BDI Makassar
- Sasaran Kegiatan Keempat (SK4), yaitu: “Terwujudnya birokrasi Balai Diklat Industri Makassar yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima”, Indikator Kinerja
  - c. Nilai laporan keuangan BDI Makassar meningkat dari 69 pada 2020 menjadi 75 pada 2024.
  - d. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) BDI Makassar meningkat dari 69 persen pada 2020 menjadi 75 persen pada 2024.
  - e. Nilai kearsian BPSDMI meningkat dari 0 pada 2020 menjadi

77 pada 2024.

- Sasaran Kegiatan Kelima (SK5), yaitu “Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian”

Indikator Kinerja:

- a. Nilai rata-rata Indeks Kompetensi profesional ASN BDI Makassar meningkat dari 70 pada 2020 menjadi 73 pada 2024
- Sasaran Kegiatan Keenam (SK6), yaitu “Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien”

Indikator Kinerja:

- a. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti meningkat dari 90 persen pada 2020 menjadi 93 persen pada 2024.
- b. Level Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) meningkat dari level 1 pada 2020 menjadi level 3 pada 202

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran yang telah ditetapkan maka ditetapkan pula cara untuk mencapai tujuan, sasaran yaitu arah kebijakan Balai Diklat Industri Makassar adalah sebagai berikut :

#### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BDI Makassar 2020-2024

Pembangunan SDM Industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran SDM di bidang industri sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dicantumkan salah satu strategi utama MP3EI yaitu Penguatan Kemampuan SDM dan Iptek Nasional. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas sumberdaya manusia yang terus membaik adalah potensi daya saing yang luar biasa. SDM yang produktif merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi. Untuk menghasilkan tenaga kerja yang produktif, maka diperlukan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan.

Dalam peta strategi Kementerian Perindustrian yang terdapat dalam Renstra 2020-2024, dinyatakan pengembangan kemampuan SDM yang kompeten merupakan salah unsur yang diperlukan dalam pencapaian Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang yaitu “Indonesia menjadi Negara industri tangguh maka diperlukan daya saing yang kuat, dan untuk mendorong daya saing industri,

diperlukan sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan industri luar negeri.

Untuk menjamin strategi pengembangan program penataan struktur industri seoptimal mungkin dan pengelolaan SDM aparatur dan dunia usaha dapat terlaksana dengan baik dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan sumber daya yang digunakan lebih efisien maka dirumuskan suatu kebijakan operasional yaitu penyelenggaraan diklat berbasis spesialisasi dan kompetensi bagi aparatur dan dunia usaha serta profesionalisme SDM aparat diklat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya diarahkan pada efektivitas dan efisiensi dengan dukungan sumber daya yang ada dan biaya APBN maupun swadana dalam rangka peningkatan PNBK.

### **Strategi**

BDI Makassar sebagai unit pendukung pelaksana tugas pokok Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian, merupakan unit kerja yang mempunyai peran melaksanakan pendidikan dan pelatihan fungsional, teknis dan dunia usaha yang berbasis pada spesialisasi dan kompetensi. Renstra BDI Makassar disusun berdasarkan tugas pokoknya.

Berdasarkan hasil analisa dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, dan memanfaatkan faktor Kekuatan, Peluang yang ada serta menyadari akan adanya Kelemahan serta Ancaman yang terdapat pada BDI Makassar, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran disusunlah strategi sebagai berikut:

### **Strategi dengan memanfaatkan Kekuatan dan Peluang.**

Balai Diklat Industri Makassar memiliki kekuatan dalam hal sarana dan prasarana yang memadai misalnya adanya teaching factory serta peralatan dan mesin untuk mendukung pelaksanaan diklat di BDI Makassar, kekuatan selanjutnya yakni pegawai BDI Makassar yang ada cukup memadai ditambah lagi dengan pengalaman dalam penyelenggaraan diklat dan tersedianya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang sesuai dengan spesialisasi kompetensi BDI Makassar (rumput laut, kakao, dan kemasan) sehingga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan diklat di BDI Makassar, kemudian disinerjikan dengan peluang yang ada yaitu tersedianya anggaran yang memadai, adanya kebijakan dalam pengembangan diklat 3 in 1, adanya dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan diklat yang dilakukan di BDI Makassar, cakupan wilayah perekrutan yang cukup luas, berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), adanya potensi agro lainnya yang dapat diolah dengan menggunakan mesin/peralatan yg tersedia di BDI Makassar, serta adanya kerjasama dengan direktorat jenderal IKM dan agro maka strategi yang bisa diwujudkan adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana di Balai Diklat Industri Makassar
2. Menjalinkan kerjasama yang intensif dengan pihak terkait
3. Peningkatan kualitas sistem penyelenggaraan diklat 3 in 1 di BDI Makassar (SOP)

4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Balai Diklat Industri Makassar
5. Menyusun kurikulum dan modul berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

**Strategi dengan memanfaatkan Kekuatan dan memperhatikan Ancaman.**

Balai Diklat Industri Makassar memiliki kekuatan dalam hal sarana dan prasarana yang memadai misalnya adanya teaching factory serta peralatan dan mesin untuk mendukung pelaksanaan diklat di BDI Makassar, kekuatan selanjutnya yakni pegawai BDI Makassar yang ada cukup memadai ditambah lagi dengan pengalaman dalam penyelenggaraan diklat dan tersedianya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang sesuai dengan spesialisasi kompetensi BDI Makassar (rumput laut, kakao, dan kemasan) sehingga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan diklat di BDI Makassar, disinerjikan dengan ancaman yang ada yaitu, terbatasnya perusahaan industri rumput laut, terbatasnya perusahaan industri kakao, terbatasnya ruang lingkup spesialisasi BDI Makassar (rumput laut, Kakao, dan kemasan), kurangnya jalinan kerjasama dengan asosiasi rumput laut dan kakao. Sehingga strategi yang diperoleh yakni:

6. Memaksimalkan fasilitas sarana prasaranan yang ada
7. Pendekatan dan peningkatan kerjasama intensif dengan asosiasi dan perusahaan rumput laut dan kakao
8. Melakukan upaya untuk inovasi produk pada diklat yang diselenggarakan di BDI Makassar
9. Sosialisasi kurikulum dan modul berdasarkan SKKNI

**Strategi dengan memanfaatkan Peluang dan memperhatikan Kelemahan.**

Peluang BDI Makassar adalah tersedianya anggaran yang memadai, adanya kebijakan dalam pengembangan diklat 3 in 1, adanya dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan diklat yang dilakukan di BDI Makassar, cakupan wilayah perekrutan yang cukup luas, berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), adanya potensi agro lainnya yang dapat diolah dengan menggunakan mesin/peralatan yang tersedia di BDI Makassar, serta adanya kerjasama dengan direktorat jenderal IKM dan agro dan dengan menyadari kelemahan yang ada yakni pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang tersedia (rumput laut dan kakao) serta belum adanya tenaga laboran dan teknisi mesin/listrik maka strategi yang dapat diwujudkan adalah:

1. Pemanfaatan LSP dan TUK yang terlisensi
2. Pengembangan kurikulum dan modul berbasis kompetensi (rumput laut dan kakao)
3. Rekrutmen tenaga laboran dan teknisi mesin/listrik.

**Strategi untuk mengurangi Kelemahan dan Ancaman.**

Faktor kelemahan yakni asesor yang belum memiliki sertifikasi spesialisasi, pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) masih dalam proses, kurikulum berbasis kompetensi yang belum tersedia (rumput laut dan kakao) serta belum adanya tenaga laboran dan teknisi mesin/listrik dan faktor Ancaman yakni

terbatasnya perusahaan industri rumput laut, terbatasnya perusahaan industri kakao, terbatasnya ruang lingkup spesialisasi BDI Makassar (rumput laut, Kakao, dan kemasan), kurangnya jalinan kerjasama dengan asosiasi rumput laut dan kakao. Sehingga untuk menghilangkan atau meminimalkan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran BDI Makassar, maka diperlukan strategi

1. Mengikuti uji sertifikasi spesialisasi asesor bagi asesor di BDI Makassar
2. Pemanfaatan LSP dan TUK yang terlisensi
3. Penyusunan kurikulum dan modul berbasis kompetensi (rumput laut dan kakao)
4. Rekrutmen tenaga laboran dan teknisi mesin/listrik.
5. Menjalinkan kerjasama dengan pihak yang terkait untuk memperluas jaringan informasi

### **Strategi Terpilih**

Dengan memperhatikan semua strategi yang telah diuraikan di atas serta mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi BDI Makassar, maka dapat dipilih empat strategi utama dalam mencapai tujuan dan Sasaran BDI Makassar sebagai berikut :

1. Pemanfaatan LSP dan TUK yang terlisensi
2. Menyusun kurikulum dan modul berdasarkan SKKNI dengan pihak terkait (RL, kakao)
3. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana diklat di BDI Makassar sesuai dengan spesialisasi kompetensi dan diluar spesialisasi BDI Makassar
4. Peningkatan kualitas sistem penyelenggaraan diklat 3 in 1 di BDI Makassar (SOP)
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Diklat Industri Makassar
6. Menjalinkan dan meningkatkan kerjasama yang intensif dengan

- industri dan asosiasi (rumput laut, kakao, dan kemasan), pemda, dan direktorat jenderal IKM dan agro
7. Promosi dan sosialisasi tentang sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri sesuai dengan SKKNI ke pihak yang terkait
  8. Penerapan sertifikasi kompetensi pada SDM Industri
  9. Penciptaan dan/atau pengembangan wirausaha melalui program inkubator bisnis
  10. Rekrutmen tenaga laboran dan teknisi mesin/listrik

### **Program**

Sebagai upaya untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran dan Strategi yang telah ditetapkan, BDI Makassar menyusun program dan kegiatan prioritas dalam kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut :

1. ***Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian***, sebagai upaya peningkatan kualitas SDM Industri melalui rencana kerjayang akan dilaksanakan antara lain meliputi:
  1. Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 In 1 Bagi Calon Tenaga Kerja Industri Rumput Laut, kakao, kemasan)
  2. Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Sistem 3 In 1 (pelatihan, Sertifikasi, Dan Kompetensi)
  3. Menyusun Modul Berbasis Kompetensi
  4. Membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan TUK Sektor Industri
  5. Menyelenggarakan Uji Kompetensi Sektor Industri
  6. Membentuk Tempat Uji Kompetensi (tuk) Sektor Industri
  7. Menyusun Dokumen Perencanaan
  8. Menyusun Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program Dan Kegiatan

9. Menyusun Administrasi BMN Dan Tata Kelola Arsip
10. Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Dan Manajemen Kinerja
11. Membangun/merenovasi Gedung/bangunan Perkantoran
12. Menyediakan Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
13. Menyediakan Peralatan Dan Fasilitas Pendidikan Dan Pelatihan
14. Menyediakan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi
15. Menyelenggarakan Diklat Teknis Industri
16. Melaksanakan Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Widyaiswara Dan Instruktur
17. Membayarkan gaji dan Tunjangan Pegawai
18. Menyelenggarakan Layanan Operasional dan Peeliharaan Perkantoran

### **3.1.1. Penguatan Kelembagaan Balai Diklat Industri**

Untuk memperkuat kelembagaan Balai Diklat Industri (BDI) terdapat delapan arah kebijakan, yaitu:

#### **1. Mengembangkan ruang lingkup dan spesialisasi jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri**

Sejalan dengan perkembangan industri nasional dan global serta mempertimbangkan tugas pokok BDI, maka kompetensi BDI dalam menyelenggarakan diklat bagi SDM industri perlu terus dikembangkan. Untuk itu, perlu dilakukan pemetaan kebutuhan kompetensi tenaga kerja industri dari sisi jenjang/level/jabatan (okupasi) serta jumlah tenaga kerja. Langkah pemetaan tersebut dilakukan untuk:

- mendapatkan potret kebutuhan tenaga kerja Industri dari 7 (tujuh) sektor industri prioritas serta pola peningkatan kualitas SDM industri yang dibutuhkan.
- mengetahui potret kekuatan internal BDI dalam melaksanakan pelatihan untuk menjawab potret kebutuhan tersebut.

## 2. Mengembangkan program dan modul pelatihan berbasis kompetensi

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) merupakan salah satu model program pengembangan SDM industri dilaksanakan sejak tahun 2016 BDI. PBK dilakukan untuk meningkatkan kualitas kompetensi tenaga kerja industri agar sesuai dengan kebutuhan pada sektor industri terkait. Sehingga, tercipta *link and match* antara *supply* tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri. PBK menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap berdasarkan standar kompetensi yang diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten dan berdaya saing. Dengan ditetapkannya ruang lingkup dan spesialisasi BDI, masing-masing BDI harus melengkapi program dan modul pelatihan berbasis kompetensi agar dapat melaksanakan amanah pelatihan vokasi industri dengan sistem *3-in-1* (pelatihan, uji kompetensi, dan penempatan pada sektor industri).

## 3. Menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi (*skilling, upskilling, dan re-skilling*) tenaga kerja industri dengan sistem *3-in-1*

Penyelenggaraan pelatihan vokasi industri di BDI dilakukan dengan sistem *3-in-1*, yaitu pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi dan penempatan lulusan pelatihan. Untuk menyelenggarakan pelatihan vokasi industri dengan sistem *3-in-1*, langkah yang perlu dilakukan BDI yaitu:

- 1) *Memorandum of Understanding* (MoU) kerja sama dengan industri
- 2) Rekrutmen peserta pelatihan
- 3) Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi
- 4) Penempatan kerja
- 5) *Tracer study* alumni peserta pelatihan

## 4. Mengembangkan skema dan uji kompetensi LSP

Saat ini seluruh BDI telah memiliki LSP Pihak 1 dengan skema sertifikasi sesuai jenis diklat yang dilakukan. Seiring perkembangan kondisi dan kebutuhan diklat, skema sertifikasi perlu terus dikembangkan. Hal-hal yang perlu dilakukan BDI dalam mengembangkan perangkat sertifikasi kompetensi antara lain:

- 1) Pengembangan skema sertifikasi
- 2) Mengembangkan Materi Uji Kompetensi (MUK)
- 3) Penguatan asesor kompetensi dari segi teknis dan metodologi
- 4) Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK)
- 5) Sistem digitalisasi uji kompetensi

#### **5. Mengembangkan sertifikasi kompetensi internasional**

Selain menyelenggarakan sertifikasi kompetensi melalui LSP yang telah dilisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) seperti yang selama ini dilakukan, BDI perlu melakukan peninjauan kerja sama dengan sertifikasi yang berlaku di negara lain ataupun diakui secara internasional. Ke depan, BDI diharapkan dapat menjadi *Authorized Training Body* (ATB) pada sektor-sektor industri sesuai spesialisasi kompetensinya. Langkah yang dapat dilakukan BDI untuk mencapai hal tersebut, yaitu:

- 1) Identifikasi standar kompetensi internasional
- 2) Identifikasi lembaga sertifikasi internasional
- 3) Kerjasama dengan lembaga sertifikasi internasional

#### **6. Membangun sinergi serta menumbuhkan wirausaha industri melalui penyelenggaraan inkubator bisnis**

Selain fokus pada penyiapan tenaga kerja industri kompeten, BDI juga berperan dalam penyiapan wirausaha industri melalui jalur inkubator bisnis. Penyelenggaraan inkubator bisnis di BDI harus tetap mempertimbangkan spesialisasi kompetensi serta kompetensi inti yang terdapat di wilayahnya. Tahapan pengembangan inkubator bisnis yang dapat dilakukan BDI adalah:

- 1) Menjalin kemitraan dengan asosiasi, pelaku industri, politeknik, dan K/L terkait sebagai akselerator pengembangan inkubator bisnis vokasi industri.
- 2) Mendorong peserta pelatihan menjadi wirausaha.
- 3) Memfasilitasi kemitraan dengan industri besar.
- 4) Pengembangan fasilitas inkubator bisnis.
- 5) Pengembangan SDM inkubator bisnis (*coach, trainer, pengelola*).

## 7. Membangun *smart training facility*

Pelatihan yang diselenggarakan bagi para SDM industri sudah sepatutnya perlu disesuaikan dengan era industri 4.0 yang menjadi tren global maupun nasional. Untuk menyelenggarakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan bagi industri 4.0, dimulai dengan membangun fasilitas pelatihan yang cerdas (*smart training facility*). *Smart training facility* memanfaatkan teknologi terkini sebagai fasilitas penyelenggaraan pelatihan. Ragam komponen *smart training facility* yang dimaksudkan mencakup *smart infrastructure* (perangkat), *smart classroom*, dan *smart monitoring* peserta pelatihan. Dalam membangun *smart training facility*, langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh BDI, yaitu:

- 1) Mengembangkan infrastruktur berbasis *smart*/industri 4.0.
- 2) Mengembangkan model *smart training*.
- 3) Mengembangkan *Learning Management System* (LMS) yang terintegrasi.

## 8. Menyelenggarakan pelatihan bagi ASN yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian

Pembina industri merupakan salah satu unsur SDM industri selain tenaga kerja industri dan wirausaha industri. Kebijakan peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional yang telah diambil pemerintah berdampak pada peningkatan kebutuhan pelatihan pada setiap jenjang jabatan fungsional. Arah kebijakan pengembangan dan pembinaan pembina industri baik di tingkat pusat maupun daerah telah disusun oleh Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan (Pusbindiklat) SDM Aparatur Kementerian Perindustrian. Sebagai unit kerja pelatihan yang dimiliki Kemenperin, BDI juga mendapatkan mandate untuk menyelenggarakan pelatihan bagi pembina industri pusat dan daerah, khususnya bagi jabatan fungsional yang berada di lingkungan Kemenperin. Langkah yang dilakukan BDI sebagai penyelenggara pelatihan bagi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian yaitu:

- 1) Rekrutmen peserta
- 2) Penyiapan tenaga pengajar
- 3) Penyiapan sarana prasana
- 4) Penyiapan Tempat Uji Kompetensi bagi pejabat fungsional

### 3.2. Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang dapat memfasilitasi dan mendorong upaya pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara. Adapun beberapa regulasi yang disusun dan ditetapkan selama periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kerangka Regulasi BDI Makassar 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
1	RPeraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018	Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2038	Pemprov Sul Sel	Pemprov Sul Sel dan satker balai pelatihan	2022
2	Rpermen Penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi dengan Sistem <i>3-in-1</i>	PP tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Ditjen di lingkungan Kemenperin	2022
3	Rpermen Pengembangan ASN Industri Berbasis Kompetensi	PP tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PAN-RB	2022

### 3.3. Kerangka Kelembagaan

Dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki, tujuan UU No. 3/2014 tentang Perindustrian, serta visi misi dan Nawa Cita Kabinet Kerja 2020-2024, beberapa hal pokok yang menjadi implikasi utama pada keorganisasian perindustrian, yaitu:

1. Pentingnya mengintegrasikan pembangunan industri dari hulu ke hilir dalam rangka penguatan struktur industri melalui pendekatan rantai pasokan dalam penciptaan nilai tambah (*supply-value chain*);
2. Pentingnya mengembangkan industri pendukung (*supporting industry*) yang efektif yang untuk penguatan struktur industri; dapat diperankan oleh IKM;
3. Pentingnya penyebaran industri ke luar Jawa melalui pendekatan perwilayahan untuk mengoptimalkan rantai pasokan dalam penciptaan nilai tambah dengan pemanfaatan potensi sumber daya alam nasional yang tersebar;
4. Pentingnya peningkatan potensi kolaborasi dalam rantai pasokan global (*global supply chain*); dan

5. Pentingnya dukungan dan penguasaan teknologi untuk percepatan pembangunan industri terutama dalam penciptaan nilai tambah tanpa mengabaikan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat luas.

Balai Diklat Industri Makassar adalah satuan kerja di bawah koordinasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Perindustrian, dan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor: 40/M-IND/PER/5/2014, tanggal 26 Mei 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Diklat Industri yang menerangkan tugas dan fungsi Balai Diklat Industri yang berbunyi:

1. Tugas (Pasal 2) :

Balai Diklat mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri yang mana Balai Diklat Industri Makassar memiliki fokus spesialisasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri meliputi pengolahan rumput laut, kakao dan rumah kemasan.

2. Fungsi (Pasal 3):

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Balai Diklat Industri Makassar menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri.
- b. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pembina industri.
- c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri, wirausaha industri kecil dan industri menengah yang berbasis spesialisasi dan kompetensi.
- d. Pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja industri.
- e. Penyelenggaraan inkubator bisnis untuk wirausaha industri kecil dan industri menengah.
- f. Pelaksanaan identifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dunia usaha industri.
- g. Pelaksanaan kerjasama dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan industri.

- h. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan dan pelatihan industri.
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha balai diklat industri.

#### Susunan Organisasi

Dalam rangka untuk mengkoordinir pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka susunan Organisasi BDI Makassar terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Seksi Pengembangan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dari masing- masing Sub. Bagian Tata Usahadan Seksi- Seksi adalah sebagai berikut:

- a. Subbagian Tata Usaha melakukan tugas penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan administrasi kepegawaian dan manajemen kinerja, keuangan, persuratan, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, kehumusan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Balai Diklat Industri.
- b. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis spesialisasi dan kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi, penyelenggaraan incubator bisnis, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- c. Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan identifikasi kompetensi, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penempatan, monitoring pasca pendidikan dan pelatihan, kerjasama pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan *workshop/teachingfactory/inkubator* bisnis.

- d. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan

Struktur Organisasi Balai Diklat Industri Makassar Kementerian Perindustrian sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 1 : Struktur Organisasi Balai Diklat Industri Makassar**

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

#### 4.1 Target Kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2020-2024, Balai Diklat Industri Makassar akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perindustrian yang dijabarkan pada Bab 3 serta struktur organisasi. Sasaran program yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa kegiatan. Berikut ini Indikator Kinerja Program BDI Makassar 2020-2024:

Tabel 3. Target Kinerja BDI Makassar 2020-2024

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>Tj</b>	<b>Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional</b>						
	1 Tersedianya SDM industri yang kompeten						
<b>SK1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja Industri</b>						
	1 Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Orang	1450	3100	4200	4300	4500
<b>SK2</b>	<b>Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan</b>						
	1 Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Internasional	Sertifikasi	0	0	1	1	2
	2 Jumlah inkubator bisnis industri yang tumbuh	Tenant	5	9	10	10	12
<b>SK3</b>	<b>Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri</b>						
	1 Persentasi nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BDI Makassar	Persen	0	50	60	60	70
<b>SK4</b>	<b>Terwujudnya Birokrasi BDI Makassar yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima</b>						
	1 Nilai laporan keuangan BDI Makassar	Nilai	69	70	72	73	75
	2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) BDI Makassar	Nilai	69	70	72	73	75
	3 Nilai kearsipan BDI Makassar	Nilai	0	75	77	77	77
<b>SK5</b>	<b>Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Profesional dan Berkepribadian</b>						
	1 Rata-rata Indeks Kompetensi, profesional ASN BDI Makassar	Indeks	58	58	60	70	73
<b>SK6</b>	<b>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>						
	1 Rekomendasi hasil pengawasan internal	persen	90	91,5	92	92	93

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru				
			2020	2021	2022	2023	2024
	telah ditindaklanjuti						
2	Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Level	1	3	3	3	3

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat hukum yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran dari suatu kegiatan. Indikator kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja kegiatan berkaitan dengan sasaran kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di BDI Makassar merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi setingkat satuan kerja.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

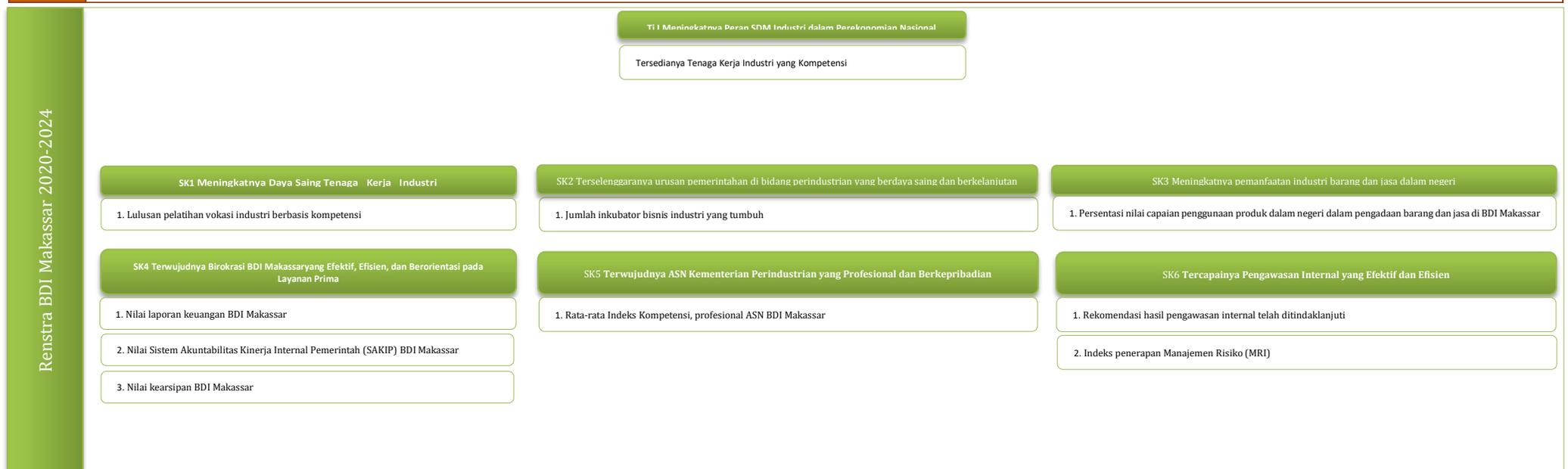
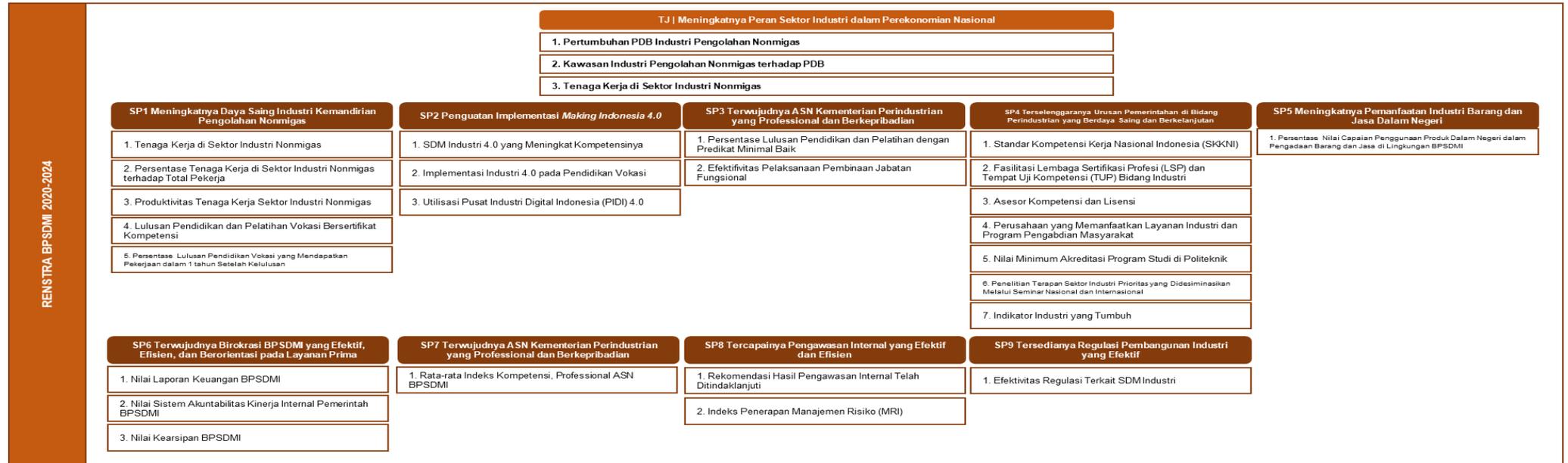
Penyusunan Rencana Strategis Balai Diklat Industri Makassar ini merupakan langkah awal bagi organisasi dalam melakukan pengukuran kinerja di lingkungan unit kerjanya .

Dengan tersusunnya Rencana Strategi Balai Diklat Industri Makassar ini maka diharapkan semua program kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Balai Diklat Industri Makassar akan berjalan lancar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.

Untuk itu perlu dipahami secara seksama oleh segenap aparatur Balai Diklat Industri Makassar yang berada di dalamnya, dan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam melakukan aktivitas kerja sehingga kegiatan organisasi sesuai dengan rencana dan program kerja yang ditetapkan.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Pohon Kinerja



## Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Unit Kerja

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Balai Diklat Industri Makassar</b>								<b>18</b>	<b>18</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>32</b>		
<b>SK1</b>	<b>Meningkatnya daya saing Tenaga Kerja Industri</b>													
	1	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Orang	1450	3105	4200	4300	4500						BDI
<b>SK2</b>	<b>Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan</b>													
	1	Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Internasional	Sertifikasi	0	0	1	1	2						BDI
	2	Inkubator industri yang tumbuh	Tenant	5	9	10	10	12						BDI
<b>SK3</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>													
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker daerah di lingkungan BPSDMI	Persen	50	50	60	60	70						BDI
<b>SK4</b>	<b>Terwujudnya Birokrasi BDI Makassar yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima</b>													
	1	Nilai laporan keuangan BDI Makassar	Nilai	70	70	72	72	73						BDI
	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) BDI Makassar	Nilai	70	70	72	72	73						BDI
	3	Nilai kearsipan BDI Makassar	Nilai	0	75	77	77	77						BDI

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>SK5</b>	<b>Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Profesional dan Berkepribadian</b>													
	1	Rata-rata Indeks Kompetensi, profesional ASN BDI Makassar	Indeks	58	58	60	70	73						BDI
<b>SK6</b>	<b>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>													
	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	persen	90	91,5	92	92	93						BDI
	2	Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Level	1	3	3	3	3						BDI

**Lampiran 3 Matriks Keterkaitan antara Aktivitas/Kegiatan, KRO, RO, Indikator Kinerja, dan Sasaran Strategis**

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri</b>									
<b>Sasaran Strategis</b>	<b>SS1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas</b>							
<b>Indikator Kinerja SS</b>	<b>SS1.8</b>	<b>Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi</b>	<b>Pusdiklat Industri</b>	<b>Orang</b>	<b>17.000</b>	<b>43.000</b>	<b>27.600</b>	<b>95.000</b>	<b>100.000</b>
Sasaran Program	SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP1.4	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Pusdiklat Industri	Orang	17.000	43.000	27.600	95.000	100.000
Sasaran Kegiatan	SK1	Meningkatnya daya saing Tenaga Kerja Industri	BDI Makassar						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK1.1	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	BDI Makassar	Orang	1450	3105	4200	4300	4500
<b>Sasaran Strategis</b>	<b>SS3</b>	<b>Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa serta Industri Halal dalam negeri</b>							
<b>Indikator Kinerja SS</b>	<b>SS3.1</b>	<b>Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin</b>	<b>Semua Unit Eselon I</b>	<b>Persen</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>90</b>
Sasaran Program	SP5	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP5.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI	Semua Unit Eselon II dan satker daerah di BPSDMI	Persen	0	50	60	70	80
Sasaran Kegiatan	SK3	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	BDI Makassar						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK3.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BDI Makassar	BDI Makassar	Persen	0	50	60	60	70
<b>Sasaran Strategis</b>	<b>SS8</b>	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan</b>							

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Kinerja SS	SS8.2	Infrastruktur kompetensi industri	Pusdiklat SDM Industri	SKKNI	8	10	10	10	10
Sasaran Program	SP4	Meningkatkan Infrastruktur Kompetensi Industri	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP4.1	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri	Pusdiklat Industri	SKKNI	8	8	10	10	10
Sasaran Kegiatan	SK2	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	BDI Makassar						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK2.1	Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Internasional	BDI Makassar	Sertifikasi	0	0	1	1	2
Indikator Kinerja Program	SP4.7	Inkubator Bisnis industri yang tumbuh	Pusdiklat Industri	Tenant	41	34	50	60	70
Sasaran Kegiatan	SK2	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	BDI Makassar						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK2.2	Inkubator industri yang tumbuh	BDI Makassar	Tenant	5	9	10	10	12
<b>Sasaran Strategis</b>	<b>SS9</b>	<b>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>							
Indikator Kinerja SS	SS9.2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Semua Unit Eselon I	Persen	91	91,5	92	92,5	93
Sasaran Program	SP8	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP8.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Set BPSDMI	Persen	91	91,5	92	92,5	93
Sasaran Kegiatan	SK6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	BDI Makassar						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK6.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	BDI Makassar	Persen	90	91,5	92	92	93

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Kinerja SS	SS9.3	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Semua Unit Eselon I	Level	3	3	3	4	4
Sasaran Program	SP8	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP8.2	Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Set BPSDMI	Level	3	3	3	4	4
Sasaran Kegiatan	SK6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	BDI Makassar						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK6.2	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	BDI Makassar	Level	1	3	3	3	3
<b>Sasaran Strategis</b>	<b>SS10</b>	<b>Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian</b>							
Indikator Kinerja SS	SS10.1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin	Set BPSDMI	Indeks	70	71	73	76	80
Sasaran Program	SP7	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP7.1	Rata-rata Indeks Kompetensi, profesional ASN BPSDMI	BPSDMI	Indeks	70	71	73	76	80
Sasaran Kegiatan	SK5	Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	BDI Makassar						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK5.1	Indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Balai Diklat Industri Makassar	BDI Makassar	Indeks	58	58	60	70	73
<b>Sasaran Strategis</b>	<b>SS12</b>	<b>Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima</b>							
Indikator Kinerja SS	SS12.1	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN	Setjen	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sasaran Program	SP7	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	BPSDMI						

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Kinerja Program	SP7.1	Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Set BPSDMI	Nilai	70	72	74	76	78
Sasaran Kegiatan	SK4	Terwujudnya birokrasi Balai Diklat Industri Makassar yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	BDI Makassar						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK4.1	Nilai Laporan Keuangan Balai Diklat Industri Makassar	BDI Makassar	Nilai	70	70	72	72	73
Indikator Kinerja Program	SP7.3	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	Set BPSDMI	Nilai	0	75	77	79	80
Sasaran Kegiatan	SK4	Terwujudnya birokrasi Balai Diklat Industri Makassar yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	BDI Makassar						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK4.3	Nilai kearsipan Balai Diklat Industri Makassar	BDI Makassar	Nilai	0	75	77	77	77
<b>Sasaran Strategis</b>	<b>SS13</b>	<b>Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel</b>							
<b>Indikator Kinerja SS</b>	<b>SS13.2</b>	<b>Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian</b>	<b>Seluruh Eselon II</b>	<b>Nilai</b>	<b>78</b>	<b>78,2</b>	<b>78,4</b>	<b>78,6</b>	<b>78,8</b>
Sasaran Program	SP7	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP7.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Set BPSDMI	Nilai	70	72	74	76	78
Sasaran Kegiatan	SK4	Terwujudnya birokrasi Balai Diklat Industri Makassar yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	BDI Makassar						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK4.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Balai Diklat Industri Makassar	BDI Makassar	Nilai	70	70	72	72	73

## Lampiran 4 Pedoman Kinerja

### 1. Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas						
IK.1	Lulusan Pelatihan Vokasi Industri berbasis kompetensi	5.000	1450	3105	4200	4300	4500
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>							
Program pelatihan yang meliputi skilling, upskilling, dan reskilling dengan skema 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri, merupakan program penyiapan tenaga kerja industry melalui pelatihan berbasis kompetensi dan mengikuti sertifikasi kompetensi mengacu pada standard kompetensi serta lulusannya langsung ditempatkan bekerja pada perusahaan industri. Penyediaan SDM yang kompeten dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelatihan pada balai diklat industri Makassar. Capaian target ini merupakan jumlah peserta program pelatihan 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) yang terserap di dunia industri.							
Jumlah lulusan pelatihan diklat sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) pada Balai Diklat Industri Makassar							
<b>SUMBER DATA</b>							
Berita acara penempatan lulusan diklat 3 in 1							
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>							
Menghitung jumlah peserta diklat 3 in 1 pada Balai Diklat Industri yang mengikuti uji kompetensi dan terserap di dunia kerja pada tahun berjalan							
<b>SATUAN</b>		<b>KLASIFIKASI</b>		<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>			
Orang		Maksimalisasi		BDI Makassar			

### 2. Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Internasional

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP4	Terseleenggaranya urusan pemerintah di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan						
IK2.1	Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Internasional	0	0	0	1	1	2
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>							
Selain menyelenggarakan sertifikasi kompetensi melalui LSP yang telah dilisensi BNSP seperti yang selama ini dilakukan, BDI perlu melakukan penajajaran kerja sama sertifikasi yang berlaku di negara lain ataupun diakui secara internasional. Ke depan, BDI diharapkan dapat menjadi Authorized Traing Body (ATB) pada sektor-sektor industri sesuai spesialisasi kompetensinya. Langkah yang dapat dilakukan BDI untuk mencapai hal tersebut yaitu :							
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi standar kompetensi internasional</li> <li>2. Identifikasi lembaga sertifikasi internasional</li> <li>3. Kerja sama dengan lembaga sertifikasi internasional</li> </ol>							
Output dari kegiatan ini adalah jumlah Lembaga sertifikasi Internasional yang bekerjasama dengan Pusdiklat dan BDI.							
<b>SUMBER DATA</b>							
MoU Kerjasama antara Lembaga sertifikasi internasional dengan Pusdiklat dan BDI							
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>							
Jumlah MoU Kerjasama antara Lembaga sertifikasi internasional dengan Pusdiklat dan BDI							
<b>SATUAN</b>		<b>KLASIFIKASI</b>		<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>			
Lembaga Internasional		Maksimalisasi		BDI			

### 3. Inkubator industri yang tumbuh

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP6	<b>Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan</b>						
IK.2.2	Inkubator Bisnis industri yang tumbuh	0	5	9	10	10	12
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>							
<p>Program Inkubator Bisnis merupakan suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan kepada Peserta Inkubasi (Tenant). Tenant inkubator bisnis pada balai diklat dan Pendidikan tinggi adalah masyarakat (umum dan mahasiswa, alumni) yang telah memiliki prospektif usaha.</p> <p>Adapun tahapan kegiatan inkubator bisnis di balai diklat dan Pendidikan tinggi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahap Pra Inkubasi</li> <li>2. Tahap Inkubasi</li> <li>3. Tahap Pasca Inkubasi</li> </ol> <p>Peserta inkubasi terdiri dari peserta yang sudah memiliki usaha sebelumnya ataupun mulai dari awal.</p> <p>Output dari inkubator bisnis ini adalah tenant yang memiliki produk yang siap di pasarkan.</p>							
<b>SUMBER DATA</b>							
Sertifikat tanda menyelesaikan kegiatan inkubator bisnis.							
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>							
Jumlah tenant yang memiliki produk yang siap di pasarkan							
<b>SATUAN</b>		<b>KLASIFIKASI</b>		<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>			
Tenant		Maksimasi		BDI			

### 4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker daerah di lingkungan BPSDMI

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP5	<b>Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa serta Pemberdayaan Industri Halal dalam negeri</b>						
IK.3.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker BDI Makassar	NA	0	50	60	60	70
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>							
<p>Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.</p>							
<b>SUMBER DATA</b>							
Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.							
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>							
<p>Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Kemenperin diperoleh melalui rumus: <math>R_{P3DN} = \frac{RA_{P3DN}}{TotA_{P3DN}}</math></p> <p>Ket:</p> <p><math>R_{P3DN}</math> = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Kemenperin</p> <p><math>RA_{P3DN}</math> = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN.</p> <p><math>TotA_{P3DN}</math> = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.</p>							
<b>SATUAN</b>		<b>KLASIFIKASI</b>		<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>			
Persen		Maksimasi		Seluruh Unit Pusat dan Satuan Kerja Daerah			

#### 5. Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai BPSDMI

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP7	<b>Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian</b>						
IK.5.1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin	NA	58	58	60	70	73
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>							
Indeks profesionalitas ASN Kementerian Perindustrian adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.							
<b>SUMBER DATA</b>							
Laporan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Kementerian Perindustrian							
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>							
Perhitungan indeks merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah).							
<b>SATUAN</b>		<b>KLASIFIKASI</b>		<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>			
Indeks		Maksimasi		Seluruh Unit Pusat dan Satuan Kerja Daerah			

#### 6. Nilai Laporan Keuangan BDI Makassar

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP6	<b>Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima</b>						
IK.4.1	Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	70	69	70	72	73	75
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>							
Laporan keuangan pada satuan kerja di lingkungan kementerian perindustrian wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan kementerian perindustrian bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tepat waktu.							
<b>SUMBER DATA</b>							
Nilai Laporan Keuangan berasal dari Biro Keuangan kementerian Perindustrian.							
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>							
Penilaian Laporan Keuangan dari Biro Keuangan Kementerian Perindustrian dengan lingkup yang dinilai antara lain: Kelengkapan Laporan Keuangan yang meliputi (penjelasan umum, penjelasan laporan operasional, penjelasan laporan perubahan ekuitas, pengungkapan penting lainnya), kelengkapan lampiran meliputi (lampiran BMN dan Lapiram E Rekon).							
<b>SATUAN</b>		<b>KLASIFIKASI</b>		<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>			
Nilai		Maksimasi		Set. BPSDMI, Satuan Kerja Daerah			

## 7. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah BPSDMI

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2018	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP6	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima						
IK.4.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BDI Makassar	75	69	70	72	73	75
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>							
<p>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh KemenPANRB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.</p> <p>Penilaian SAKIP Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran selanjutnya.</p>							
<b>SUMBER DATA</b>							
Data Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian dari KemenPANRB.							
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>							
Perhitungan nilai SAKIP Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.							
<b>SATUAN</b>		<b>KLASIFIKASI</b>		<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>			
Persen		Maksimasi		Semua satuan kerja pusat dan daerah			

## 8. Nilai kearsipan BPSDMI

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2018	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP6	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima						
IK.4.3	Nilai kearsipan BDI Makassar	0	0	75	77	77	77
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>							
Penilaian kearsipan diselenggarakan oleh Biro Umum Kemenperin tiap tahun dengan tim penilai berasal dari arsiparis tiap satuan pusat dan satuan kerja daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian							
<b>SUMBER DATA</b>							
Data nilai kearsipan dari Biro Umum Kementerian Perindustrian							
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>							
Nilai Kearsipan satuan pusat dan satuan kerja daerah							
<b>SATUAN</b>		<b>KLASIFIKASI</b>		<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>			
Nilai		Maksimasi		Semua satuan kerja pusat dan daerah			

**9. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker**

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>SP8</b>	<b>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>						
IK1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	90	90	91,5	92	92	93
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>							
Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja/satker bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.							
<b>SUMBER DATA</b>							
Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan, <i>database</i> Itjen							
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>							
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker dihitung melalui perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan.							
<b>SATUAN</b>		<b>KLASIFIKASI</b>		<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>			
Persen		Maksimasi		Seluruh Unit Pusat dan Satuan Kerja Daerah			

**10. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian**

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>SP8</b>	<b>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>						
IK.2	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	NA	1	3	3	3	3
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>							
Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi. Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2,3,4, serta 5. Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP.							
<b>SUMBER DATA</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian mandiri level MRI; dan</li> <li>- Nilai final level MRI dari hasil <i>Quality Assurance</i> oleh BPKP.</li> </ul>							
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>							
Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut.							
<b>SATUAN</b>		<b>KLASIFIKASI</b>		<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>			
Level		Maksimasi		Seluruh Unit Pusat dan Satuan Kerja Daerah			

## Lampiran 5 Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
1	RPeraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018	Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2038	Pemprov Sul Sel	Pemprov Sul Sel dan satker balai pelatihan	2022
2	Rpermen Penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi dengan Sistem 3- <i>in-1</i>	PP tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Ditjen di lingkungan Kemenperin	2022
3	Rpermen Pengembangan ASN Industri Berbasis Kompetensi	PP tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PAN-RB	2022